



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SABANG
UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HUSAINI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 407399

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.501.077.588

1. Tanah Seluas 1120 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.133.546.400
2. Tanah Seluas 9447 m2 di KAB / KOTA BIREUEN, WARISAN Rp. 1.367.531.188

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 326.250.000

1. MOBIL, HONDA CR.V RD4/JEEP Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
2. MOBIL, HONDA HR-V Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 264.600.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 16.650.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 22.600.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 13.191.202

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.863.118.790

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.863.118.790

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.